JPPG : Jurnal Pengembangan Profesi Guru
e-ISSN : 2988-4306

KETERKAITAN ANTARA POLITIK PENDIDIKAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEKUASAAN SERTA IMPLIKASINYA PADA PRAKTEK PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN (ISLAM)

Damanhuri[1]
Damanhuri1332@gmail.com
Shodikin[2]
Jamiluddin Yacub[3]
Ermanita Permatasari[4]
Siti Kholijah[5]
STAI Darussalam Lampung

Abstract

Islamic educational institutions spread throughout the country have become an important concern in the context of politics and power in Indonesia. This article aims to investigate how Islamic education and politics and power influence each other in Indonesia. The discussion in the article covers topics such as politics playing a role in Islamic educational institutions, the relationship between politics, power and Islamic education in Indonesia, the significance of political elements in Islamic education, and the role played by Islamic education in this country. The article will also discuss a number of related issues, such as the role of education in the realm of politics and power, the situation of Islamic education in Indonesia, educational patterns in Indonesia, and four issues that are closely related to the implementation of education based on power, including the process of domestication and misunderstanding, indoctrination, democracy in education, as well as social integration.

Kay World : *Educational Politics, Educational Policy, Power Islamic Educational Institutions.*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian karya yang menggambarkan pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Proses pendidikan diarahkan untuk membantu manusia mencapai potensi sejati mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang baik dalam konteks sosial, bangsa, dan negara.[1]

Menurut Dewantara pendidikan adalah bimbingan dalam pertumbuhan anak-anak, membimbing semua potensi yang ada pada mereka sehingga mereka dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang paling tinggi sebagai manusia dan anggota masyarakat.[2]

[1] Dinas Pendidikan. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pustaka Pelajar*, (2005a). 34
[2] Dewantara, K. H. *Bagian I: Pendidikan cetakan kedua*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, (1977), 26

JPPG: jurnal pengembangan profesi guru Edisi No.1
Volume.2 Maret 2024
ISSN: 2988-4306
Recived: 2024-02-21 Revised: 2024-02-29 Aproved: 2024-03-01

Konsep ini senada dengan pandangan Anas Salahudin, yang mendefinisikan pendidikan sebagai upaya sadar untuk mendidik, membentuk, mengawasi, mempengaruhi, dan mentransmisikan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan menghilangkan ketidaktahuan, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan melibatkan pendidik dan peserta didik dalam usaha interaktif untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan individu yang terlibat dalam pendidikan. Namun, saat ini terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendidikan, terutama yang disebabkan oleh kurangnya kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman.[3]

Penting untuk dicatat bahwa isu-isu tersebut mencerminkan permasalahan dalam pendidikan di Indonesia, dan bukan semata-mata kesalahan satu pihak. Dalam konteks ini, pendidik dan sistem pendidikan menjadi perhatian utama karena mereka terlibat langsung dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan adalah hasil kebijakan pemerintah, dan oleh karena itu, pemerintah memegang kendali penuh terhadap sistem pendidikan. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur nilai-nilai pendidikan yang diterapkan dalam masyarakat, dan ini otoritas ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari zaman kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, hingga pasca reformasi. Selama masa kolonial Belanda, tujuan utama pendidikan adalah menciptakan tenaga kerja yang murah untuk mendukung eksploitasi kolonial Belanda. Hal ini tercermin dalam praktik kerja paksa (Daendels 1808 M) dan pengumpulan pajak yang sangat menyengsarakan masyarakat pribumi, terutama yang beragama Islam.[4]

Setelah kemerdekaan Indonesia, akses pendidikan menjadi lebih mudah bagi penduduk pribumi, terutama yang memeluk agama Islam. Pesantren-pesantren dan ulama memainkan peran penting dalam menyebarkan pendidikan agama Islam di masyarakat. Meskipun pendidikan menjadi lebih inklusif, masih ada polemik dan perlu dilakukan rekonstruksi bertahap untuk mencapai sistem pendidikan yang sesuai dengan esensi pendidikan. Dari sejarah ini, terlihat bahwa pemerintah (kekuasaan) memiliki pengaruh yang signifikan pada pendidikan. Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan dapat dianggap

[3] Basir, A., & Ramadan, W. *Pembentukan Karakter Kepemimpinan Siswa Melalui Sekolah Alam (Studi Kasus di Sekolah Dasar AlamMuhammadiyah Banjarbaru)*, (2017), 54
[4] M Mansyur. *Jurnal Sejarah* .(Citra Lekha 1 (1), 24

sebagai hubungan mutualisme, komensalisme, atau bahkan parasitisme, seperti dalam ilmu biologi.

Sebuah kekuasaan yang ingin berhasil dalam menjalankan masa pemerintahannya untuk jangka waktu yang lama harus mengontrol kurikulum pendidikan, dalam teori pemerintahan, pendidikan menjadi indikator utama yang menentukan arah perkembangan bangsa. Banyak kepentingan politik yang telah memanfaatkan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kondisi bangsa agar menuju kemajuan. Masyarakat tidak memiliki kekuatan politik untuk menghentikan pengaruh ini, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memastikan konsistensi dalam sistem pendidikan.[5]

Masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan keterkaitan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan, kekuasaan, dan implikasinya pada praktik pendidikan di lembaga pendidikan Islam dapat meliputi:

1. Politik Pendidikan: Politik pendidikan mencakup proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Tergantung pada keadaan politik di suatu negara, kebijakan pendidikan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Ini bisa mempengaruhi pendanaan, kurikulum, dan regulasi lembaga pendidikan Islam.
2. Kebijakan Pendidikan: Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dapat memiliki dampak langsung pada lembaga pendidikan Islam. Misalnya, kebijakan tentang kurikulum, ujian standar, atau akreditasi dapat mempengaruhi cara lembaga pendidikan Islam mengatur program pendidikan mereka.
3. Kekuasaan dan Kontrol: Kekuasaan dalam konteks pendidikan bisa berasal dari pemerintah, badan pengawas pendidikan, atau entitas lain yang memiliki otoritas. Kontrol atas lembaga pendidikan Islam dapat memengaruhi bagaimana mereka beroperasi, termasuk pemilihan staf pengajar, pembentukan kurikulum, dan penentuan arah pendidikan.
4. Implikasi pada Praktik Pendidikan: Implikasi dari keterkaitan ini dapat sangat beragam. Misalnya, dalam situasi di mana pemerintah mempromosikan kurikulum nasional yang lebih sekuler, lembaga pendidikan Islam mungkin harus menyesuaikan kurikulum mereka untuk memenuhi persyaratan tersebut sambil tetap mempertahankan nilai-nilai

[5] Yamin, Moh, *Menggugat Pendidikan Indonesia,Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009); 94

keagamaan. Selain itu, pengaruh politik dan kebijakan juga dapat memengaruhi pendanaan lembaga, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya pendidikan.

5. Tantangan Terkait Kebebasan Akademik: Keterkaitan antara politik, kebijakan, dan kekuasaan juga dapat memunculkan tantangan terkait kebebasan akademik di lembaga pendidikan Islam. Penekanan pada ideologi atau pandangan politik tertentu dapat membatasi kebebasan akademik staf pengajar dan mahasiswa untuk menyelidiki, mempertanyakan, atau mengembangkan gagasan secara bebas.
6. Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Politik: Terkadang lembaga pendidikan Islam juga dapat menjadi aktor politik atau menjadi tempat di mana nilai-nilai politik tertentu ditanamkan pada siswa. Hal ini bisa memunculkan pertanyaan tentang netralitas pendidikan dan peran lembaga tersebut dalam membentuk pandangan politik siswa.

Penting untuk memahami bahwa hubungan antara politik pendidikan, kebijakan, kekuasaan, dan praktik pendidikan di lembaga pendidikan Islam bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di mana lembaga-lembaga tersebut beroperas

Oleh karena itu, makalah ini akan membahas keterkaitan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan dan kekuasaan serta implikasinya pada praktek pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

B. Pembahasan

Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan memiliki berbagai makna. Istilah "politik" bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang urusan negara, tindakan kebijakan, strategi pemerintahan, atau bahkan ilmu untuk mencapai kekuasaan.[6] Kekuasaan, dari segi etimologi, merujuk pada kemampuan atau wewenang untuk mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi suatu hal, sedangkan dari segi terminologi, kekuasaan mengacu pada kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan memengaruhi sesuatu .[7]

Isu kekuasaan memiliki daya tarik, terutama dalam masyarakat modern, di mana berbagai jenis kekuasaan seperti militer, ekonomi, politik, dan lainnya memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Meskipun ada berbagai jenis kekuasaan, perhatian masyarakat umumnya lebih tertuju pada kekuasaan politik. Namun, perlu diingat bahwa kekuasaan politik hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan konsep kekuasaan sosial. Arif

[6]Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. *Kamus Ilmiah Populer*. (Arkola, 1994). 36
[7] Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Mitra Pelajar, (2005b), 32

Rohman, dalam karyanya, menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan politik untuk memaksa masyarakat secara sah dalam rangka mengatur dan memerintah. Kekuasaan politik membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk sarana paksaan seperti senjata, penjara, teknologi, dan pendidikan. Pendidikan bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan politik, dan ini mencerminkan bagaimana pendidikan Islam dalam dunia pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kekuasaan politik.[8]

Relasi antara Politik, Kekuasaan, dan Pendidikan

Sirozi mengklarifikasi bahwa hubungan antara politik, kekuasaan, dan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sosial politik masyarakat di mana hubungan tersebut berlangsung.[9] Bentuk hubungan ini dapat sangat kuat dan jelas di suatu masyarakat, sementara di masyarakat lain, hubungan tersebut bisa lemah atau tidak terlihat. Pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan di negara-negara berkembang dapat berbeda sesuai dengan pola yang dibentuk oleh kekuasaan yang ada. Dalam dunia pendidikan Islam, hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang jelas. Sejarah peradaban Islam ditandai oleh perhatian serius para ulama dan penguasa terhadap pendidikan untuk memperkuat posisi sosial-politik kelompok dan pengikut mereka. Penting diakui bahwa perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh para penguasa, yang memerlukan dukungan dari lembaga pendidikan untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan mereka. Karena tujuan pemerintahan Islam adalah menerapkan kebenaran dan keadilan, yang tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang mendalam tentang syariat. Syariat tidak dapat ditegakkan tanpa masyarakat yang memahami syariat.[10]

Dalam konteks pemahaman ini, jika kita memahami kekuasaan sebagai pemerintah yang berdaulat, maka hubungan yang muncul adalah bahwa pendidikan Islam merupakan kebutuhan negara. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan Islam sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945,

[8] Rohman, A. *Kebijakan Pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi*. (Aswaja Pressindo.2012)
[9] Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. (PT Raja Grafindo Persada, 2005). 55
[10] Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, 55

terdapat frase "mencerdaskan kehidupan bangsa," yang menunjukkan bahwa negara harus memajukan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. [11]

Apabila diperhatikan lebih lanjut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan Islam. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia (2016).

Berdasarkan rumusan Undang-Undang dasar di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam. Bahkan lebih lanjut, pemerintah cenderung memasukkan nilai-nilai Islam dalam peraturan undang-undang, seperti terlihat dalam ayat tiga yang menitikberatkan pada peningkatan keyakinan dan moralitas, serta ayat kelima yang menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dalam Islam sebagai ajaran dasar. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, pengawasan bersama perlu diadakan untuk mencegah penyalahgunaan peraturan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, implementasi suatu kebijakan harus mengikuti tahapan yang berlaku, dimulai dari perumusan isu dan agenda pemerintah, yang kemudian diformulasikan menjadi kebijakan pendidikan dan dijalankan. Evaluasi kebijakan adalah bagian penting dari proses implementasi, karena hal ini akan membantu menilai relevansi dan manfaat suatu kebijakan, serta memastikan apakah kebijakan tersebut memberikan kesejahteraan atau justru mempersulit kehidupan masyarakat.[12]

H.A.R. Tilaar mengidentifikasi empat masalah yang terkait dengan implementasi pendidikan berdasarkan kekuasaan:

[11] Rifai, M. *Politik Pendidikan Nasional*. (Ar-Ruzz Media, 2011), 62
[12] Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. *Kebijakan Pendidikan*. (Pustaka Pelajar, 2012), 34

1. Domestikasi dan Stupidifikasi: Proses pendidikan di sekolah sering kali terlihat sebagai upaya untuk "menjinakan" individu dengan aturan yang ketat, yang dapat mengurangi kreativitas dan menghasilkan individu yang "bodoh" yang tunduk pada kekuasaan;
2. Indoktrinasi: Pendidikan kadang-kadang melibatkan indoktrinasi, yang melibatkan penyampaian ilmu dengan cara yang dipaksakan tanpa memberikan kebebasan dalam pemilihan;
3. Demokrasi pendidikan: Membicarakan demokrasi pendidikan berarti berbicara tentang kebebasan dalam pendidikan, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih. Meskipun demokrasi pendidikan telah diterapkan di Indonesia, implementasinya masih perlu diperbaiki;
4. Integrasi Sosial: Tidak selalu diperlukan kekuasaan untuk mencapai integrasi sosial. Pendidikan yang baik juga dapat menjadi sarana integrasi sosial yang efektif tanpa harus memaksa budaya lokal hilang.[13]

1. Pendidikan Islam

Menurut Achmadi, definisi Pendidikan Islam adalah usaha untuk merawat dan memajukan kodrat manusia serta sumber daya manusia yang dimilikinya agar mereka dapat menjadi individu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[14] Kodrat manusia merujuk pada kecenderungan alami manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam juga harus berpusat pada tujuan utama manusia, yaitu beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sementara menurut Abudin Nata, dalam mendefinisikan Pendidikan Islam, perlu memperhatikan akar kata pendidikan seperti Al-Tarbiyah, Al-Ta'lim, Al-Ta'dib, dan Al-Tahzib. Ini mengubah makna pendidikan menjadi lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Lebih daripada itu, pendidik juga harus menyampaikan pengetahuan bersama dengan nilai-nilai moral yang membantu peserta didik dalam pengembangan karakter moral mereka sepanjang kehidupan.[15]

2. Pola Pendidikan Islam di Indonesia

[13] Baharudin Dan H. Ibnu Hizam, *Peran KekuasaanDalam Pendidikan*, Volume 13, No. 1. 2022, Https://Journal.Uinmataram.Ac.Id
[14] Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam*: (Paradigma Humanis Teoritis. Pustaka Pelajar, 2008), 86
[15] Nata, A. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Prenada Media, 2016), 32

Terdapat beragam teori mengenai kapan Islam pertama kali tiba di Indonesia, seperti teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka, teori Persia oleh Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, dan teori Maritim oleh N.A. Baloch. Meskipun setiap teori memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, semuanya menunjukkan kemungkinan kedatangan Islam ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan laut (Negara, 2016).

Martin menunjukkan bahwa setelah Islam tiba di Indonesia, perkembangan pendidikan dimulai dengan pembentukan majelis-majelis di berbagai tempat seperti surau (masjid kecil). Selain itu, mulai muncul pusat-pusat pendidikan yang meminta peserta didik untuk tinggal di lokasi tersebut agar dapat menerima pendidikan dari para guru. Inilah awal munculnya tempat-tempat pemukiman yang pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan kedua setelah surau, meskipun istilah "pesantren" belum digunakan pada saat itu.[16]

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren telah memainkan peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dan menghasilkan ulama, guru agama, mubaligh, tokoh politik, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendirian pesantren pada awalnya memiliki misi khusus, yaitu: (1) menghasilkan ulama yang dapat menyebarkan agama di masyarakat, (2) membentuk karakter santri yang moral dan religius, dan (3) menanamkan kesadaran bahwa belajar adalah pengabdian kepada Tuhan, bukan sekadar meraih keberhasilan dunia.[17]

Selain pesantren, ada juga sekolah Islam yang muncul karena sekelompok individu yang ingin membuka sekolah dengan sistem "Sekolah Belanda" dengan tambahan pelajaran agama. seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Mathla'ul Anwar, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Al-Jam'iyatul Washliyah juga berperan dalam mengembangkan pendidikan Islam. Mereka mendirikan sekolah formal dengan pelajaran agama Islam dan menambahkan kata "Islam" di belakang nama sekolah, seperti SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam.[18]

Selain lembaga pendidikan di atas, terdapat juga perguruan tinggi Islam, baik swasta maupun negeri, yang telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Satiman Wirjosandjojo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi

[16] Bruinessen, M. V. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. (Gading Publishing, (2012), 103
[17] Dawam, A. R., & Ta'arifin, A. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. (Listafariska, 2005), 32
[18] Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam Dalam Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Departemen Agama, 2005), 70

Islam untuk meningkatkan harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang saat itu sedang dalam penjajahan. Di Indonesia, kebutuhan akan pendidikan tinggi Islam sangat mendesak untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan pemikiran Islam. Dalam konteks ini, sekolah tinggi Islam mulai didirikan.[19]

3. Politik dalam Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Reformasi adalah proses perubahan, perbaikan, dan pembaharuan. Oleh karena itu, politik dalam reformasi pendidikan mengacu pada upaya pembaruan dalam dunia pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor politik kekuasaan. Buchori mengungkapkan bahwa generasi politik yang mengatur negara selama periode Orde Baru tumbuh pada saat pendidikan di Indonesia telah mengalami penurunan kualitasnya. Ekspansi sistem pendidikan yang cepat tanpa pemahaman yang mendalam telah mengakibatkan penurunan mutu sekolah. Hal ini terjadi karena jumlah elit pendidikan yang terbatas, yang harus mengelola sistem pendidikan yang berkembang sangat cepat.[20]

Selama masa Orde Baru, birokrasi digunakan sebagai alat untuk campur tangan dalam semua aspek kehidupan negara. Penguasa memiliki peran utama dalam pemerintahan, sehingga campur tangan penguasa dalam berbagai aspek kehidupan negara menjadi instrumen penting untuk mendukung kelangsungan kekuasaan mereka. Akibat sistem sentralisasi ini, banyak kalangan cendikiawan dan masyarakat cenderung menjadi apatis dalam berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif.

Sistem pemerintahan Orde Baru ini menghambat perkembangan gerakan oposisi yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah atau penguasa. Dalam negara demokratis, keberadaan oposisi penting. Namun, di Indonesia, pemerintah seringkali melihat gerakan oposisi sebagai ancaman terhadap keberadaan penguasa, dan oposisi selalu dicurigai dan sering dihadapi dengan otoritarianisme.

Selain itu, ada situasi di mana pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah, menggunakan pendidikan Islam sebagai alat politik. Terkadang, isu-isu pendidikan digunakan sebagai slogan politik untuk mempertahankan kekuasaan, baik selama masa pemerintahan mereka maupun dalam konteks pemilihan umum. Bahkan, partai-partai yang

[19] Yunus, M. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. (Mutiara Sumberwidya, 1992), 24
[20]Buchori, M. *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Kanisius, 2000), 23

tidak bertanggung jawab terlibat dalam lingkungan pendidikan dan mencoba mempengaruhi siswa dengan iming-iming bantuan alat-alat yang terkait dengan keberhasilan sekolah.

Sering kali terlupakan bahwa aspek politik adalah bagian penting dari pendidikan Islam. Aspek ini menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan, hubungan antar negara, hubungan antar organisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan Islam dan politik memiliki keterkaitan erat yang sulit dipisahkan.

Di Indonesia, munculnya madrasah adalah hasil dari perubahan surau tradisional menuju pendidikan modern. Namun, Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa peran ulama dalam membentuk budaya kerakyatan yang mencakup aspek kemasyarakatan dan politik selain aspek spiritual. Hal ini terbukti dari banyaknya alumni pesantren yang melanjutkan studi di universitas terkemuka, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pendekatan pendidikan Islam di Indonesia sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan lembaga yang mendirikannya.

Sebagai akibat dari beragamnya orientasi pendidikan, muncul berbagai tokoh formal dan informal dengan pemikiran dan aktivitas politik yang beragam pula. Terdapat variasi pemikiran dari yang modern, fundamentalis, tradisional, hingga nasionalis. Meskipun perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan dan budaya, institusi pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pemikiran seseorang yang berbeda.

4. Implikasi secara riel terhadap lembaga pendidikan Islam

Implikasi secara riil terhadap lembaga pendidikan Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana lembaga-lembaga tersebut beroperasi. Berikut beberapa implikasi yang mungkin terjadi:

1. **Pengaruh Kebijakan Pemerintah**: Lembaga pendidikan Islam mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pendanaan, kurikulum, dan regulasi lainnya. Di negara-negara di mana pendidikan Islam diatur oleh pemerintah, kebijakan tersebut dapat memengaruhi pendanaan, penentuan kurikulum, dan pengaturan tenaga pengajar.
2. **Pengembangan Kurikulum**: Lembaga pendidikan Islam perlu menyesuaikan kurikulum mereka untuk memenuhi standar nasional atau internasional. Ini bisa melibatkan integrasi materi non-Islam seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sambil tetap mempertahankan identitas Islam dalam pendidikan agama.

3. **Ketersediaan Sumber Daya**: Implikasi riil juga dapat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, termasuk dana, buku teks, fasilitas, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Lembaga pendidikan Islam mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mengembangkan fasilitas yang memadai.
4. **Interaksi dengan Masyarakat Luas**: Lembaga pendidikan Islam juga bisa dipengaruhi oleh interaksi dengan masyarakat luas. Hal ini dapat mencakup hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan non-Islam, kerja sama dengan organisasi masyarakat, atau respons terhadap perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap agama dan pendidikan.
5. **Pembentukan Identitas dan Nilai**: Lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan nilai siswa. Implikasi riilnya termasuk bagaimana lembaga-lembaga ini menyampaikan pesan-pesan keagamaan, mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang Islam, dan membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.
6. **Tantangan Global**: Dalam era globalisasi, lembaga pendidikan Islam juga mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka sambil tetap relevan dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara global.

Penting untuk diingat bahwa implikasi riil terhadap lembaga pendidikan Islam dapat sangat berbeda di setiap wilayah, tergantung pada berbagai faktor seperti politik, budaya, dan masyarakat

C. Penutup

Politik kekuasaan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan mereka. Untuk mempertahankan kekuasaan mereka, pemerintah memerlukan masyarakat yang cerdas dan kompeten dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan adalah cara utama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas. Namun, sayangnya, dalam beberapa kasus, pendidikan disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka. Mereka melakukan

ini dengan menciptakan kebijakan atau sistem yang mendukung dan membenarkan kekuasaan mereka.

Pendidikan Islam, meskipun awalnya bukan berasal dari kekuasaan, juga terlibat dalam dinamika kekuasaan. Pembentukan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, seringkali memerlukan izin dari penguasa. Oleh karena itu, pendidikan Islam dan kekuasaan saling mendukung dan saling membutuhkan satu sama lain

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teoritis*. Pustaka Pelajar.

Basir, A., & Ramadan, W. (2017). *Pembentukan Karakter Kepemimpinan Siswa Melalui Sekolah Alam (Studi Kasus di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru*).

Bruinessen, M. V. (2012). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Gading Publishing

Buchori, M. (2000). *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Kanisius.

Dawam, A. R., & Ta'arifin, A. (2005). Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren. Listafariska.

Dewantara, K. H. (1977). *Bagian I: Pendidikan cetakan kedua*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dinas Pendidikan. (2005a). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Pustaka Pelajar.

Djumhur, & Danasuparta, D. (1959). *Sejarah Pendidikan*. CV Ilmu.

Febriana, A. (2022). *Kasus Dugaan Kekerasan Guru terhadap Murid*.

Hoetomo. (2005b). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar.

https://regional.kompas.com/read/2018/03/08/12274191/ditegur-karena-main- ponsel-di-kelas-murid-hajar-guru-dengan-kursi?page=all

https://www.kompasiana.com/anisfebriana7716/62d5e58a6e7f014c277d6601/kas us-dugaan-kekerasan-guru-terhadap-murid

Irawan, Y. K. (2018). *Ditegur Karena Main Ponsel Di Kelas Murid Hajar Guru dengan Kursi*.

Jurnal Muadalah, *IV*(1), 1—14. http://jurnal.uin antasari.ac.id/index.php/psj/article/view/2118/1540

M Mansyur. Jurnal Sejarah Citra Lekha 1 (1), 24-39, 2016. 5, 2016. *Menelusuri jejak-jejak masa lalu Indonesia. N Yusliani, M Mansyur*. Banjarmasin Press,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Sekretariat Jendral MPR RI.

Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam Dalam Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Departemen Agama, 2005)

Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.

Negara, A. M. S. (2016). *Api Sejarah*. CV Tria Pratama.

Noer, D. (1983). *Administrasi Islam di Indonesia*. Yayasan risalah.

Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.

Purnamasari, I. (2017). *Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan: Studi Etnografi pada Pelaku Homeschooling di Yogyakarta*.

R& Mof, Y. (2022). *Sekolah Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis dan Pendidikan Humanis pada Sekolah Dasar Islam* Creative Banjarbaru. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, *7*(2), 124. https://doi.org/10.31602/muallimuna.v7i2.6606

Rahardjo, M. D. (1993). *Intelektual Intelejensia Dan Perilaku Politik Risalah Cendikiawan Muslim*. Mizan.

_____. (2020). Sekolah Alam di Kalsel; Latar Belakang, Ekspektasi dan Persepsi. *Madrasah, 12* (1), 40—51. https://doi.org/10.18860/mad.v12i1.7656

Rifai, M. (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media.

Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Aswaja Pressindo

Salahudin, A. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Pustaka Setia.

Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Mutiara Sumberwidya

© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). I.